Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi Publik

Administrasi berasal dari bahasa Belanda *Administratie* yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor. Administrasi dalam arti luas berasal dari bahasa Inggris *Administration*, yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian 2008:14). Administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Menurut Plano administrasi publik adalah suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. Nicholas Henry memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) antara lain:

1. Pelayanan Publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumberdaya manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Kebijakan publik yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

2.2 Pelayanan Publik

Menurut Moenir dalam Harbani Pasolong (2014:124), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui akivitas orang lain secara langsung, sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993) mengatakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Agung Kurniawan dalam Harbani Pasolong (2014:128) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN nomor 25 tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepmen PAN nomor 58 tahun 2002 mengelompokan tiga jenis pelayanan pemerintah dan BUMN/BUMD, yaitu pelayanan administrasi, barang dan jasa. Pelayanan administrasi adalah pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan *output*nya berupa dokumen. Pelayanan barang adalah pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa penyediaan dan pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada pelanggan dalam suatu sistem. Pelayanan jasa adalah pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya, pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik, tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain (Lijan Poltak Sinambela : 2006 : 6-7).

2.3 *Good Governance*

Menurut Falih Suaedi (2014:13) *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

2. Tegaknya Supremasi Hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Berorientasi pada Konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

6. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

2.4 *E-government*

Menurut Zaidan Nawawi (2013:197), secara sederhana *e-government* dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi berperan sebagai alat dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut World Bank, *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area networks*, internet dan *computer mobile* yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis dan aparatur pemerintah.

Melalui *e-government*, aspek fleksibilitas dan akses terhadap pelayanan pemerintahan akan semakin baik. Jika didalam pendekatan konvensional masyarakat yang harus datang ke birokrat, di dalam *e-government* pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan proses dan cara yang lebih cepat dan akurat. Bahkan proses pemenuhannya itu dapat dilakukan pemerintah dari mana saja dan kapan saja. Dengan cara akses kepada pemerintahan yang lebih baik itu diharapkan meningkat pula kepuasan masyarakat. Ada tiga kesamaan karakteristik dalam setiap definisi *e-government*, yaitu :

a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan
b. Melibatkan penggunaan teknologi informasi
c. Bertujuan memperbaiki mutu pelayanan yang telah berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan menurut Nurdin dan Usman, mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan Surendro dalam Zaidan (2013:197), penerapan *E-government* merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya tersebut, teknologi berperan sebagai alat yang diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Menurut Richardus Eko Indrajit (2006:15), ada beberapa element yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam penerapan *e-government*, yaitu:

a. *Suport*, yaitu keinginan dari berbagai pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep teknologi informasi, bukan hanya mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-government*. Tanpa adanya *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat terlaksana dengan baik. Yang dimaksud dukungan dalam hal ini adalah hal-hal sebagai berikut:
   1. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses suatu negara dalam mencapai visi misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagai mana kunci sukses lain.
   2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) disetiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya UU dan PP yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, di susunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain-lain)
4. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

b. *Capacity*, yaitu adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-government* terkait menjadi kenyataan. Elemen dari *capacity* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama sumber daya finansial
2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan *e-government.*
3. Ketersediaan SDM yang berkompeten agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut bukan menjadi alasan pemerintah dalam menerapkan *e-government*. Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha kerjasama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

c. *Value*, yaitu manfaat penerapan teknologi bagi *stakeholders.* Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep *e-government*. Yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah pemerintah sendiri, tetapi juga masyarakat dan mereka yang berkepentingan.

2.4.1 Manfaat *E-government*

Richardus Eko (2006:5) menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-government* bagi suatu negara antara lain :

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakehoders* terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan *good governance.*
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakholder*nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

2.4.2 Bursa Kerja *Online*

Bursa kerja *online* adalah bursa kerja yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mempertemukan/memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dengan pemberi kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website *www.infokerja.kemnaker.go.id*. Bursa kerja *online*memberikan informasi kepada pencari kerja dan pemberi kerja mengenai lowongan kerja, kapan saja, dimana saja, siapa saja dan mudah dalam melakukan pendaftaran/registrasi serta mudah dalam melihatnya. Dalam prakteknya di indonesia, sedang berlangsung pengembangan *public employment services* (PES), tujuan PES adalah mempercepat proses pelayanan penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja sehingga pencari kerja memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

PES merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang yang telah dimulai sejak September 2009. Proyek ini diadakan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian tahun 2009 yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan *Japan International*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cooperation Agency tahun 2007-2009. Adapun rekomendasi yang didapat adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan pelayanan kepada pencari kerja
b. Peningkatan pelayanan kepada pemberi kerja
c. Efisiensi pelayanan
d. Peningkatan kemudahan kepada pengguna, peningkatan keterampilan, keahlian dan motivasi petugas

Untuk dapat melaksanakan rekomendasi tersebut, proyek ini melakukan kerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat model lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja publik. Model tersebut dibuat untuk dipergunakan diseluruh Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dalam meningkatkan sistem pelayanan penempatan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan kesempatan kerja yang layak, adil dan setara tanpa diskriminasi sehingga penurunan pengangguran dapat terwujud secara optimal.

Bursa kerja *online* dapat mempersingkat proses penempatan tenaga kerja, para pencari kerja dapat segera memperoleh pekerjaan yang sesuai keterampilan, bakat dan minatnya sedangkan para pengguna tenaga kerja dapat segera menemukan tenaga kerja yang tepat yang dilakukan melalui bursa kerja *online.* Sedangkan bagi pengelola bursa kerja *online* di dinas yang membidangi tenaga kerja akan mendapatkan informasi terkait informasi pasar kerja yang cepat dan akurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut ini tampilan website bursa kerja *online*.

Gambar 2.2: Tampilan website bursa kerja*Online* Kemnaker.

***Sumber:* www.infokerja.kemnaker.go.id**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Modul aplikasi bursa kerja *online* terdiri atas modul pencari kerja, pemberi kerja dan admin dinas. Modul bagi pencari kerja terdiri atas biodata pencari kerja, info lowongan pencaker, lihat AK-1, daftar riwayat hidup dan update status pencaker. Aplikasi bursa kerja *online* bagi pemberi kerja terdiri atas data perusahaan, pasang lowongan, *jobmatching*, info pelamar dan update jadwal lowongan. Aplikasi bursa kerja *online* bagi admin dinas terdiri atas data dinas, data pencaker, data perusahaan, laporan pencaker, laporan pemberi kerja, laporan IPK dan laporan grafik.

Bagian dari halaman webportal bursa kerja *online* terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Bagian menu, merupakan bagian yang berisikan menu dari webportal ini. Di bagian menu terdapat sub menu beranda, profil dinas, pencari kerja, perusahaan, lowongan kerja, berita, dokumen, statistik perusahaan dan kontak kami.
2. Bagian *sliding* teks, menampilkan info lowongan kerja dalam negeri dan luar negeri yang ditampilkan secara dinamis bergeser secara periode tertentu.
3. Bagian *login*, menampilkan kolom untuk *login* ke aplikasi Bursa kerja *online*. *Login* hanya digunakan bagi pengguna yang telah memiliki *user* dan *password*.
4. Bagian pencarian, menampilkan kolom pencarian sesuai dengan kriteria, provinsi, kabupaten/kota.
5. Bagian lowongan dalam negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bagian lowongan luar negeri
7. Bagian *counter* pengunjung, menampilkan informasi data pengunjung web
8. Bagian statistik perusahaan, menampilkan informasi perusahaan yang telah menerima tenaga kerja
9. Bagian *link*, menampilkan *link* ke web/URL kementerian/lembaga lainnya
10. Bagian berita, menampilkan berita yang terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja

2.5 Definisi Konsep

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, oleh sebab itu ditulislah batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu :

1. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area networks*, internet dan *computer mobile* yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis dan aparatur pemerintah. Bentuk *e-government* dalam penelitian ini adalah Bursa Kerja *Online* yang terintegrasi secara nasional dan dapat di akses melalui*www.infokerja.kemnaker.go.id*.
2. Implementasi *e-government* merupakan upaya pemerintah mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.Yang dimaksud implementasi *e-government* dalam penelitian ini adalah implementasi *e-government* sesuai dengan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Bursa Kerja *Online* adalah bursa kerja yang memanfaatkan teknologi informasi dalam mempertemukan/memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website *www.infokerja.kemnaker.go.id*. Yang dimaksud bursa kerja *online* dalam penelitian ini adalah bursa kerja *online* daerah yang dikelola oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Siak.
4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan penempatan tenaga kerja secara *online*.

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah cara yang digunakan dalam menjawab masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Teori implementasi *e-government* yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit dalam bukunya yang berjudul *Electronic Government.* Menurut Richardus Eko Indrajit, ada beberapa element yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam penerapan *e-government,* yaitu:*support, capacity* dan *value.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1: Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub indikator
Implementasi *E-government* Melalui Bursa Kerja *Online* di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak	*Suport*	1. Adanya dukungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terhadap penerapan pelayanan Bursa kerja *online* 2. Dialokasikannya sumber daya 3. Dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung 4. Disosialisasikannya pelayanan bursa kerja *online*
	Capacity	1. Ketersediaan sumber daya finansial 2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi 3. Ketersediaan SDM yang berkualitas
	Value	1. Manfaat penerapan bursa kerja *online* bagi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2. Manfaat penerapan bursa kerja *online* bagi pencari kerja 3. Manfaat penerapan bursa kerja *online* bagi pemberi kerja

Sumber:Richardus Eko Indrajit, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian

Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset kejurang kemiskinan, karena dikhawatirkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu semua potensi yang ada harus dapat dimanfaatkan untuk mencari, menciptakan dan menekuni pekerjaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Mulk ayat 15 berikut ini :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya *: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dikembalikan".*

Pemerintah memiliki peranan penting dalam melayani kebutuhan masyarakatnya termasuk pelayanan penempatan tenaga kerja supaya masyarakatnya mendapat pekerjaan dan memiliki kehidupan yang layak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

Artinya : "*Barang siapa yang menolong kesusahan orang muslim, maka Allah ta'ala akan menolongnya dari kesusahan pada hari kiamat".*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, pemerintah atau siapapun yang membantu sesama termasuk juga dalam hal pekerjaan,maka Allah akan menolongnya dari kesusahan di hari kiamat nanti. Demikianlah dapat kita lihat dengan jelas perintah-perintah Allah SWT yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang perintah bagi manusia untuk bekerja dan Hadis Nabi Muhammad tentang membantu sesama manusia.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Implementasi Program Bursa Kerja Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta (Studi Kasus: Bursa Kerja *Online*) dilakukan oleh Imtikhana Puput Budianto pada tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah Bertambahnya jumlah penganguran yang menyebabkan berbagai masalah ekonomi maupun sosial. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses implementasi program Bursa Kerja *Online* sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Yang membedakan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada pelayanan bursa kerja *online* yang tidak berfungsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada permasalahan pengangguran yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian, penelitian yang menggunakan Konsep Richardus Eko Indrajit ini pelayanan bursa kerja *online* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan penelitian terdahulu yang mengacu pada konsep Wahab, semua tahap sudah dilakukan dan terimplementasi dengan baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Mutia Nurcahyani Liputo pada tahun 2015 dengan judul Penerapan *E-government* Kelurahan Di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. fokus penelitian ini adalah upaya dari pemerintah dalam mengembangkan sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem Teknologi Informasi. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan *E-government* Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah cukup efektif. Hal ini diukur berdasarkan indikator pengukuran efektivitas menurut Gibson. Yang membedakan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada pelayanan bursa kerja *online* yang tidak berfungsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada peranan pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem Teknologi Informasi. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian, penelitian yang menggunakan konsep Richardus Eko Indrajit ini pelayanan bursa kerja *online* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan penelitian terdahulu yang mengacu pada konsep Gibson, penerapan *E-government* Kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sudah cukup efektif.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dengan judul implementasi *E-government* melalui bursa kerja *online* pada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi oleh Citra Annisa pada tahun 2012. fokus penelitian ini adalah kendala yang dihadapi kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dalam implementasi *E-government* melalui bursa kerja *online*. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi pemerintah sudah baik, sumber daya dan disposisi masih kurang baik, struktur birokrasi sudah baik. Yang membedakan dengan penelitian ini, penelitian ini berfokus pada pelayanan bursa kerja *online*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang tidak berfungsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada kendala yang dihadapi kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dalam implementasi *E-government* melalui bursa kerja *online*. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil penelitian, penelitian yang menggunakan konsep Richardus Eko Indrajit ini pelayanan bursa kerja *online* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan penelitian terdahulu yang mengacu pada konsep Edward III, bursa kerja *online* di kementerian tenaga kerja belum terimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan kutipan dari tiga penelitian terdahulu tersebut, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai panduan penyusunan skripsi berjudul implementasi *e-government* melalui bursa kerja *online* ini dan mengutip beberapa teori dengan tetap mencantumkan sumbernya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.9 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3: Kerangka Berfikir

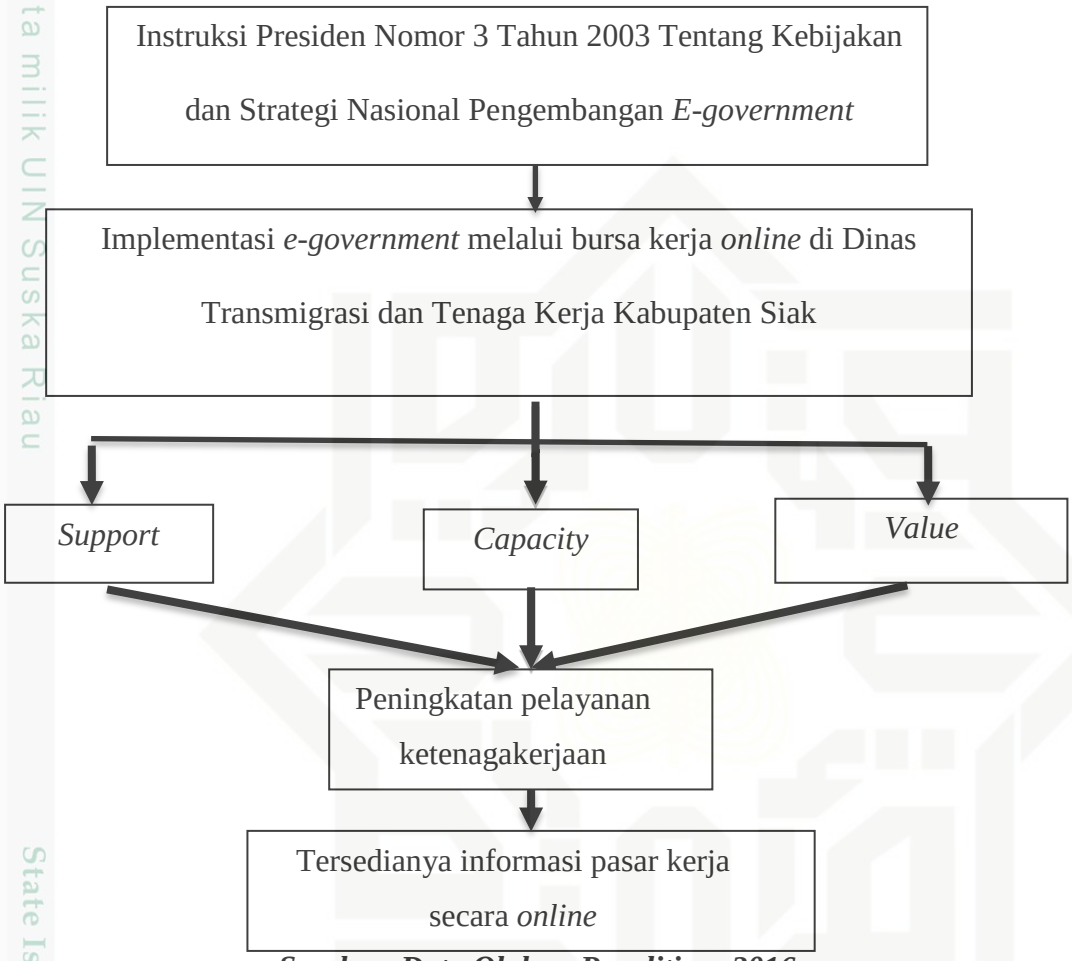

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2016